

**PELAKSANAAN KEWENANGAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DALAM PENGAJUAN
RANCANGAN UNDANG – UNDANG PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh
AHMAD HUSEN
NIM : 131200283

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2017 M/1438 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islama Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima saksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 23 April 2017



AHMAD HUSEN
NIM. 131200283

ABSTRAK

Nama: Ahmad Husen, Nim: 131200283, judul skripsi: **Pelaksanaan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengajuan Rancangan Undang-Undang Perspektif Fiqh Siyasah,**

DPD adalah bagian dari lembaga legislatif sama dengan DPR namun kewenangan DPD bersifat terbatas hanya mengajukan RUU. dalam konsep Islam anggota badan legislatif terdiri dari ahlul halli wal aqdi yang meliputi unsur perwakilan daerah dan anggota DPR. Permasalahan tugas dan fungsi DPD dan DPR dalam konstitusi Indonesia tidak pernah terjadi pada pemerintahan Islam tetapi secara substansif tidak bertentangan dengan konsep Islam.

Perumusan masalah dalam penelitian ini :1).Bagaimana Pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengajuan rancangan undang – undang tentang otonomi daerah dan hubungan pusat dan daerah dalam perspektif fiqh siyasah. 2).Bagaimana Pelaksanaan kewenangan dewan perwakilan daerah dalam pengajuan rancangan undang – undang tentang pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah dalam perspektif fiqh siyasah. 3).Bagaimana Pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengajuan rancangan undang – undang tentang pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam perspektif fiqh siyasah. Sedangkan Tujuan penelitian ini adalah 1).Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengajuan rancangan undang – undang tentang otonomi daerah dan hubungan pusat dan daerah dalam perspektif fiqh siyasah. 2).Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengajuan rancangan undang – undang tentang pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah dalam perspektif fiqh siyasah. 3).Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengajuan rancangan undang – undang tentang pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam perspektif fiqh siyasah.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*), adapun untuk pengumpulan data penulis menggunakan data primer dan sekunder dari buku-buku yang berkaitan dengan objek pembahasan. sedangkan teknik pengolahan data penulis menggunakan pendekatan berpikir induktif yaitu pengolahan data dari yang bersifat khusus dan ditarik kepada yang bersifat umum.

Kesimpulan yang dapat ditarik, Pelaksanaan kewenangan DPD mengajukan rancangan undang-undang ke DPR baik Rancangan undang-undang tentang otonomi daerah dan hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah oleh karena itu DPD di sebut dengan kamar pertama dan DPR kamar kedua yang dinamakan dengan sistem bicameral Sedangkan konsep Islam tidak ada pemisahan kewenangan karena DPD dan DPR mempunyai hak yang sama untuk membuat undang-undang (al-sulthah al-tasri'iyah).

Nomor : Nota Dinas

Kepada Yth

Lamp : 1 (Satu) Eksemplar

Dekan Fakultas Syariah

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

IAIN “SMH” Banten

a.n. Ahmad Husen

di-

NIM : 131200283

Serang

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini saudara **Ahmad Husen**, Nim: 131200283, judul skripsi: **Pelaksanaan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengajuan Rancangan Undang-Undang Perspektif Fiqh Siyasah**, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Serang, 25 April 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Zakaria Syafe’i, M.Pd.

NIP. 19560208 199203 1 001

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., MA

NIP. 19770816 2000501 1 004

**PELAKSANAAN KEWENANGAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DALAM PENGAJUAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Oleh:

AHMAD HUSEN
NIM: 131200283

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.
NIP. 19560208 199203 1 001

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., MA
NIP. 19770816 2000501 1 004

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP: 19591119 199103 1 003

Dr. H. M. Ishom, M.A.
NIP: 19760623 200604 1 002

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Ahmad Husen, Nim: 131200283, judul **PELAKSANAAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PENGAJUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.**

Telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tanggal 2017, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu (SI) pada Fakultas syariah Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Serang, 25 April 2017

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Sidang

Sekretaris Merangkap Sidang

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A

NIP. 19780225 200801 1 009

H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si

NIP. 19591104 199403 1 002

Anggota,

Penguji I

Penguji II

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum

NIP. 19690906 199603 2 002

Atu Karomah, SH., M.Si

NIP. 19602141 99903 2 001

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.

NIP. 19560208 199203 1 001

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., MA

NIP. 19770816 2000501 1 004

A decorative scroll border surrounds the text. It features a vertical scroll on the left side and a horizontal scroll at the top right corner, both with shaded circular ends.

PERSEMBAHAN

Setiap bait kalimat dalam skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tuaku yaitu ayahanda dan ibunda tercinta yaitu Ahmad Muji dan Rohyani yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan penuh, serta motivasi untuk terus sabra dan kuat dalam menjalani kehidupan

Jazakumullah

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ^ط
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(QS.An-Nisa (4):59)

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ahmad Husen, dilahirkan di Tangerang tanggal 30 Desember 1995, penulis adalah putra dari Ahmad Muji dan Rohyani anak pertama dari tiga bersaudara.

Pendidikan yang pernah ditempuh antara lain, SD Negeri Onom III lulus Tahun 2007, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMPN I Kemiri lulus Tahun 2010, SMAN 14 Kabupaten Tangerang lulus Tahun 2013, Kemudian melanjutkan kuliah di Institute Agama Islam Negeri (IAIN) “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten Fakultas Syari’ah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis berorganisasi di IPNU Ikatan Pelajar Nahdalatul ‘ulama Komisariat IAIN “SMH” Banten dan PC Kab. Serang sebagai anggota dan di HIMASPASBA Himpunan Mahasiswa Alumni SMA Negeri 14 Kab. Tangerang sebagai Ketua Umum serta aktif di HMJ Hukum Tata Negara dan DEMA-F Syari’ah sebagai wakil bidang PAD tahun 2016-2017.

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan lahir dan bathin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini.

Shalawat serta salam-Nya semoga tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat serta umatnya yang taat menjalankan ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha yang tak kenal putus asa, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***Pelaksanaan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengajuan Rancangan Undang-Undang Perpektif Fiqh Siyasah***. Kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat membawa manfaat yang benar dan berguna khususnya bagi diri penulis, pembaca dan masyarakat pada umumnya sebagai bahan pertimbangan dan khasanah ilmu pengetahuan.

Skripsi ini kemungkinan tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, yang telah memberikan kesempatan bagi keberhasilan belajar.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari’ah IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, yang telah mendorong penyelesaian studi.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A, Ketua Jurusan dan Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin M.H.,M.A., Sekretaris Jurusan Hukum Tata

Negara IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Zakaria Syafe’i, M. Pd. Selaku pembimbing I dan Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M. Ag. Selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk secara langsung dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen serta Staf akademik dan karyawan IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, yang telah membantu memberikan informasi serta pengetahuan kepada penulis.
6. Semua pihak yang telah mendukung terselesainya skripsi ini, baik moril maupun materil, terutama kedua orang tua, dan adik-adikku, serta rekan-rekanku.

Kepada para pihak tersebut diatas, penulis mendo’akan semoga amal terbaik dan keiklasannya dalam membantu penulis diterima oleh Allah SWT. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang baik dari para pembeda untuk perbaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, umumnya bagi pembeda semuanya.

Serang, 32 April 2017

Penulis

Ahmad Husen

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Abstrak.....	v
Surat Pengajuan Ujian Munaqasyah.....	vii
Persetujuan Pembimbing.....	ix
Pengesahan.....	xi
Persembahan	xiii
Motto.....	xiv
Riwayat Hidup Penulis.....	xv
Kata pengantar.....	xvii
Daftar isi.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
F. Kerangka Pemikiran.....	7
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

A. Pengertian, Sejarah dan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah	15
B. Proses Pengangkatan Dewan Perwakilan Daerah	21
C. Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah	24

BAB III KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGAJUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

A. Hak Inisiatif DPD Dalam Membuat Rancangan Undang-Undang	31
B. Sistem dan Mekanisme Penyusunan Perancangan Undang-Undang	33
C. Proses Pengajuan Rancangan Undang-Undang	36
D. Kewenangan DPD Dalam Pengajuan Rancangan Undang-Undang	37

BAB IV PANDANGAN ISLAM TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PENGAJUAN RANCANGAN UNDANG – UNDANG

- A. Pelaksanaan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengajuan Rancangan Undang – Undang tentang Otonomi Daerah dan Hubungan Pusat dan Daerah 39
- B. Pelaksanaan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengajuan Rancangan Undang – Undang tentang Pembentukan dan Pemekaran Serta Penggabungan Daerah Pelaksanaan 43
- C. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengajuan Rancangan Undang – Undang tentang Pengolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi Lainnya, yang Berkaitan dengan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah..... 47

BAB V PENUTUP

- Kesimpulan..... 53
- Saran-saran..... 53

DAFTAR PUSTAKA..... 55

LAMPIRAN.....